

L K I P

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINSOSP2KBP3A KOTA CIMAHI TAHUN 2021



DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA CIMAHI
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya atas selesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi Tahun 2021. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2021.

Kami menyadari sepenuhnya, bahwa laporan akuntabilitas kinerja ini belum memberikan gambaran keberhasilan program secara menyeluruh di semua sub bidang, namun hanya pada sub bidang yang menjadi skala prioritas. Namun demikian, intisari dari laporan kinerja ini mutlak menjadi bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi setiap perangkat daerah, para pihak yang membutuhkan dan sebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan, penyempurnaan pelaksanaan program serta untuk mewujudkan upaya penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dimasa mendatang.

Kepada berbagai pihak yang telah membantu tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2021 ini dengan sungguh – sungguh, sesuai tugas dan fungsinya di bidang urusan sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya.

Mudah – mudahan dengan integritas yang kita miliki dalam menjaga eksistensi akuntabilitas DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi ini, akan tetap menjadi elemen positif reformasi birokrasi untuk mendukung terwujudnya kehidupan masyarakat Kota Cimahi yang lebih baik.

Semoga Allah senantiasa memberikan Hidayah dan Inayah - Nya bagi kita semua, agar kita tetap memiliki kekuatan, kemudahan dan keselamatan dalam menjalankan tugas dengan baik dan profesional.

Cimahi, Desember 2021

KEPALA DINSOSP2KBP3A KOTA CIMAHI,



Drs. Guntur Priyambada

Pembina Tk I

NIP. 19660329 199201 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cimahi (DINSOSP2KBP3A) merupakan Laporan capaian Akuntabilitas Kinerja pada tahun ketiga dalam masa Renstra DINSOSP3KBP3A tahun 2018 – 2022. LKIP tahun 2021 disusun berdasarkan Rencana Kerja 2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis tahun 2018-2022 dan mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2021 yang telah disepakati antar Kepala DINSOSP2KBP3A dengan Plt.Walikota Cimahi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi tahun 2021 sangat berbeda dengan LKIP tahun sebelumnya, selain terdapat beberapa indikator program yang berbeda karena harus disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019. Selain itu juga program dan kegiatan serta target kinerja harus diselaraskan dengan perubahan RPJMD (2018-2022) sehingga diharapkan nilai capaian LKIP akan bertambah dan lebih baik sesuai yang diharapkan.

Indikator Kinerja Utama DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi juga mengalami perubahan , terdapat dua perubahan indikator yaitu Persentase Indikator Penilaian APE yang di penuhi, dan Persentase Indikator Penilaian KLA yang di penuhi. Hal ini menjadi sangat penting mengingat hasil evaluasi tahun tahun sebelumnya dengan indikator yang lama yaitu Tingkat Capaian Kota layak Anak dan Tingkat capaian Anugrah Parahyita Ekapraya (APE) sangat susah untuk memenuhi target capaian kinerja yang diharapkan.

Berkaitan dengan hal itu, maka berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 25 indikator program, dapat diinformasikan ketercapaian kinerja indikator sasaran sebagai berikut : 15 indikator kinerja program berhasil mencapai target kinerja 100 % , 9 Indikator kinerja program melebihi target yang ditetapkan, yang tidak tercapai target hanya 1 (satu) indikator saja .

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2021 dianggarkan biaya sebesar Rp. 20.425.931.136- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 16.047.969.197- atau sebesar 78,56% dan terdapat efesiensi sebesar 21,44% karena ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan karena terkendala asas legalitas dan juknis yang terlambat keluar dari Instansi lain.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	II
DAFTAR ISI.....	III
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 UMUM.....	1
1.2 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.....	2
1.2.1 Uraian Tugas.....	3
BAB II.....	5
PERENCANAAN KINERJA.....	5
2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	5
2.1.1 Hasil Evaluasi Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU).....	6
2.2 PERJANJIAN KINERJA	8
BAB III	11
AKUNTABILITAS KINERJA	11
3.1 AKUNTABILITAS KINERJA	11
3.1.1 CAPAIAN KINERJA	11
1. Capaian Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2021.....	11
2. Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja 2018 Dan 2021	14
3. Realisasi Tahun 2021 Dengan Target RPJMD.....	26
4. Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan.....	28
5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya	30
6. Cross Cutting Program Dengan SKPD Terkait Dan Instansi Lainnya.....	32
7. Prestasi, Penghargaan Dan Inovasi Kota Cimahi Tahun 2019	36
8. Prestasi, Penghargaan dan Inovasi Kota Cimahi Tahun 2018.....	36
BAB IV	37
PENUTUP.....	37
4.1 Penutup.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 UMUM

Pada tanggal 5 bulan Agustus 2021 Pemerintah Kota Cimahi telah menetapkan RPJMD Perubahan dan telah disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022 yang disesuaikan dengan kondisi aturan dan dasar hukum terbaru sehingga menjadi dasar untuk menyelaraskan program dan kegiatan serta menyelaraskan target capaian. RPJMD merupakan bahan acuan untuk menentukan Rencana Strategis Kota yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh semua OPD. Terdapat beberapa perubahan Rencana Strategis Kota dan juga terdapat beberapa IKU Walikota yang secara otomatis akan berpengaruh juga terhadap perubahan IKU Kepala OPD.

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cimahi mengampu beberapa Misi Walikota dan mempunyai empat Indikator Kinerja Utama. Pada saat dilakukan perubahan RPJMD dan Perubahan Renstra maka dilakukan juga beberapa perubahan indikator pendukung capaian IKU dan dilakukan penyesuaian target capaiannya. Hal ini dilakukan setelah melihat capaian program dan kegiatan terhadap IKU tersebut, yaitu IKU Capaian Nilai Kota Layak Anak (KLA) dan IKU Capaian Anugerah Parahyta Ekapraya (APE). Setelah dilakukan evaluasi terhadap capaian kegiatan ternyata terdapat beberapa indikator yang tidak mendukung terhadap capaian IKU tersebut yang akan mengakibatkan tidak optimalnya capaian IKU kepala DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi.

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cimahi telah melakukan perencanaan program dan kegiatan di awal tahun yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Dinas kemudian mengimplementasikannya guna dicapainya kemajuan-kemajuan dalam penanganan masalah pembangunan Kota Cimahi, khususnya bidang sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Rencana Kerja DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi Tahun 2021 telah selaras dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan *good and clean government*, maka Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kota Cimahi menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021.

Maksud Penyusunan LKIP Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cimahi Tahun 2021 yang selanjutnya disingkat menjadi DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi adalah sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi yang sudah ditetapkan di awal tahun 2021. Sedangkan tujuan dalam Penyusunan LKIP DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi ini adalah memberikan gambaran tentang pencapaian target dan sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi Tahun 2021.

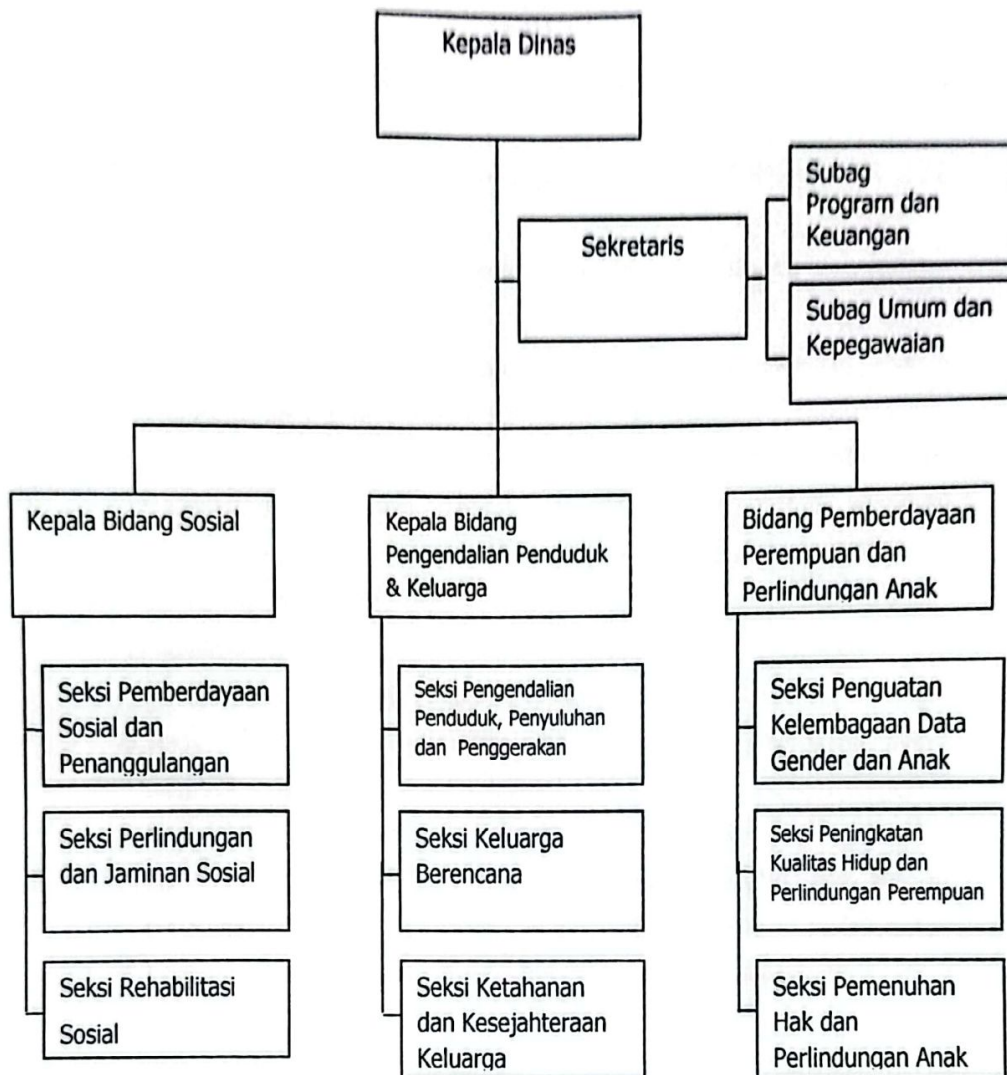
1.2 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi, dan Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi. Sesuai dengan Peraturan Wali kota Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi perangkat daerah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :



1.2.1 Uraian Tugas

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan terkait Bidang Sosial:

- 1) Masih ada Rumah Tangga Sangat Miskin yang tidak memiliki akses pendidikan dan kesehatan
- 2) Potensi PSKS yang cukup besar masih harus dioptimalkan pelayanannya
- 3) Manajemen panti sosial/LKSA masih kurang optimal, LKSA di Kota Cimahi blm punya pekerja sosial.
- 4) Kemampuan penyandang cacat dalam memperbaiki kualitas hidup belum

optimal, dan hrs diberi akses terbatas

- 5) Data PBI dan PMKS harus senantiasa divalidasi keakuratannya
 - 6) Penanganan PMKS dan masalah strategis menyangkut tanggap cepat darurat harus selalu tersedia
 - 7) Masih terdapat anak jalanan yang harus segera dicari solusi penanganannya
 - 8) Masih kurangnya sarana prasarana untuk penanganan PMKS misalnya untuk rumah singgah yang memadai
- b. Permasalahan terkait Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :
- 1) KB MKJP harus lebih digalakkan
 - 2) PIK Remaja yang sudah terbentuk harus tetap dibina pemahaman, sikap & perilakunya tentang kesehatan & hak-hak reproduksi
 - 3) Banyaknya program dan kegiatan dari Pusat (seperti Lomba lomba) yang memerlukan Biaya yang cukup tinggi dalam seremonialnya, akibatnya berkurang sumber daya baik SDM maupun anggaran untuk menggarap pemberdayaan dan peningkatan kualitas keluarga.
- c. Permasalahan terkait Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
- 1) Pembangunan yang responsif gender masih belum optimal
 - 2) Tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan sudah cukup baik, hanya tetap harus ditingkatkan kualitasnya
 - 3) Masih terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - 4) Belum terbentuknya UPTD P2TP2A sebagaimana diamanatkan oleh Permen PPPA nomor 4 tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA untuk lebih memaksimalkan peran dan fungsi P2TP2A kepada masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM). RPJPD harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional sesuai karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya, RPJPD dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMD yang merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala daerah terpilih. Sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, RPJPD dan RPJMD harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah. RPJMD Kota Cimahi Tahun 2012 – 2018, selain merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota juga harus menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mengacu pada visi dan misi yang ada dalam RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025.

Untuk mencapai visi RPJPD tersebut ditetapkan 5 (lima) misi jangka panjang Kota Cimahi, yaitu :

1. Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
3. Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah;
4. Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan;
5. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Kurun waktu tahun 2017 – 2022 merupakan pembangunan tahap keempat dalam RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025, yang mana dalam kurun waktu tersebut seluruh upaya pembangunan diarahkan pada *pemantapan piranti pendukung yang kondusif bagi kemajuan kota yang berkeadilan yang didukung masyarakat yang unggul dan kreatif, penguatan investasi dan pasar*. Oleh karena itu visi dan misi RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022 pun mengacu pada hal tersebut.

Dengan telah ditetapkan RPJMD Perubahan Kota Cimahi Tahun 2017-2022 dan evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka ditetapkanlah Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cimahi dalam SK Kepala DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi Nomor : 800/073/DINSOSP2KBP3A/2018 sebagai berikut :

Tabel. 2.1

Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4
MISI III : MEMBERDAYAKAN PEREKONOMIAN DAERAH BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN YANG BERORIENTASI PADA PENGEMBANGAN SEKTOR JASA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN INDUSTRI KECIL MENENGAH DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN			
1	Mengentaskan permasalahan PMKS	Meningkatnya penanganan permasalahan kesejahteraan sosial	Persentase penanganan PMKS
MISI I : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKEPRIBADIAN, BERAKHLAK MULIA, CERDAS, SEHAT DAN UNGGUL			
2	Mengendalikan pertumbuhan penduduk	Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang	Total Fertility Rate (TFR)
MISI V : PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SECARA BERKESINAMBUNGAN DAN BERKELANJUTAN			
3	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender
			Indeks Pemberdayaan Gender
MISI I : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKEPRIBADIAN, BERAKHLAK MULIA, CERDAS, SEHAT DAN UNGGUL			
4	Meningkatkan pemenuhan hak-hak anak	Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak	ingkat capaian Kota Layak Anak

2.1.1 Hasil Evaluasi Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kota Cimahi pada awal tahun 2021 merupakan indikator kinerja yang mengacu pada RPJMD 2018-2022 yang telah ditetapkan, Sehingga pada anggaran tahun 2021 perjanjian kinerja disesuaikan dengan RPJMD yang baru sesuai dengan visi misi kepala daerah terpilih.

Berdasarkan keputusan walikot Cimahi nomor : 060/Kep.1449-Org/2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2019-2022 telah dilakukan perubahan IKU DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi , Perubahan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh pemerintah Kota Cimahi

untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kota Cimahi.

Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi telah ditetapkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel. 2.2
Indikator Kinerja Utama Pemerintah DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi
Penetapan RPJMD 2017-2022 Dan IKU Berdasarkan Perda Kota Cimahi Nomor 5
Tahun 2021 Tentang Perubahan Perda Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018
Tentang RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017 - 2022

IKU HASIL PENETAPAN RPJMD 2017-2022				IKU BERDASARKAN PERDA KOTA CIMAHI NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN PERDA KOTA CIMAHI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG RPJMD KOTA CIMAHI TAHUN 2017 - 2022			
NO.	SASARAN STRATEGIS	NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	NO.	SASARAN STRATEGIS	NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	1	2	1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Penanganan Permasalahan Kesejahteraan Sosial	1	Persentase Penanganan PMKS	1	Meningkatnya taraf Kesejahteraan, Kualitas dan kelangsungan hidup PMKS	1	Cakupan PMKS yang mendapat bantuan sosial
2	Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang	2	Total Fertility Rate (TFR)	2	Terwujudnya Pertumbuhan Penduduk yang terkendali	2	CPR (Contraceptive Prevalence Rate)
3	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan	3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	3	Meningkatnya Kualitas Hidup Serta Perlindungan Perempuan dan Anak	3	Persentase Indikator Penilaian APE yang di penuhi
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	4	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	4	Persentase Indikator Penilaian APE yang di penuhi
4	Meningkatnya Pemenuhan Hak-hak Anak	4	Tingkat capaian Kota Layak Anak				Persentase Indikator Penilaian KLA yang di penuhi

Perubahan indikator kinerja utama dilakukan karena berdasarkan hasil evaluasi yang secara rutin dilakukan baik intern maupun eksteren terdapat indikator yang tidak terpenuhi dengan harapan kiranya pencapaian indikator yang dirubah akan dapat terpenuhi dengan baik sesuai target ditahun tahun yang akan datang.

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Untuk lebih mengarahkan upaya pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud di atas, maka tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran beserta Indikator programnya. Pada tahun 2021 target-target setiap indikator sasaran telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.3
Perjanjian Kinerja DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi Tahun 2021

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi umum bagi unit kerja	Persentase Unit kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi umum	100 %
Meningkatnya ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi	100%
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Capaian Nilai LAKIP	BB
Tersedianya Pekerja sosial Profesional dan atau TKS dan atau Relawan sosial yang disediakan	Rasio Pekerja sosial Profesional dan atau TKS dan atau Relawan sosial yang disediakan Penyandang disabilitas	1: 200
Terpenuhinya rehabilitasi sosial bagi warga Negara penyandang disabilitas di luar panti	Persentase Warga Negara Penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %
Terpenuhinya rehabilitasi sosial bagi anak terlantar di luar panti	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %
Terpenuhinya rehabilitasi sosial bagi Lanjut usia terlantar di luar panti	Persentase Lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %
Terpenuhinya rehabilitasi sosial bagi Gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase Gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %
Terpenuhinya Kebutuhan dasar Korban bencana dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	Persentase Korban bencana dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100 %
Tersedianya data fakir miskin yang digunakan untuk perlindungan dan jaminan sosial	Persentase data fakir miskin yang digunakan untuk perlindungan dan jaminan sosial	100 %
Meningkatnya rasio akseptor KB	Rasio akseptor	78,90%
Meningkatnya kemandirian akseptor KB	Rasio akseptor KB mandiri	80 %
Terkendalinya jumlah anak dalam setiap keluarga	Rata rata jumlah anak per keluarga	2,3

Terpenuhinya kebutuhan Ber-KB	Unmeet need	9,1%
Berkurangnya Pasangan Usia subur <	Cakupan PUS (Pasangan Usia Subur) < 20 tahun	0,65%
Meningkatnya cakupan kepesertaan keluarga dalm BKB	Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKB	12,39%
Meningkatnya cakupan kepesertaan keluarga dalm BKR	Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKR	14,46%
Meningkatnya cakupan kepesertaan keluarga dalm BKL	Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKL	11,66%
Meningkatnya cakupan kepesertaan keluarga dalm UPPKS	Cakupan kepesertaan keluarga dalam UPPKS	0,37%
Meningkatnya cakupan kepesertaan keluarga dalm PIK R/M	Cakupan kepesertaan keluarga dalam PIK R/M	1,25%
Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak	Persentase anak yang terlayani kebutuhan dasar	87,94%
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Persentase Partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah	33%
Terfasilitasinya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan di P2TP2A	100 %
Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender	Persentase data gender dan anak yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	100
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Persentase keluarga yang mendapat program peningkatan kualitas keluarga	100%

Berikut kami sampaikan rencana program dan anggaran dalam mendukung pencapaian target kinerja DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi Tahun 2021.

Tabel 1.4
Program yang Mendukung Perjanjian Kinerja beserta Anggaran

No	Program	Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 8.530.421.636
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp 50.212.000
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp 1.321.026.900
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp 3.011.922.000
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp 770.126.300
6	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp 662.841.200
7	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp 134.864.900

8	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rp	202.075.900
9	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Rp	58.475.000
10	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rp	222.756.100
11	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp	220.805.400
13	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rp	3.333.259.700
14	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rp	414.425.300
	JUMLAH	Rp	20.452.931.136

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 AKUNTABILITAS KINERJA 3.1.1 CAPAIAN KINERJA

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab I Laporan ini, bahwa setiap kegiatan dan hasil – hasil dari kegiatan penyelenggaraan negara/ Instansi pemerintah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Sebagai wujud pertanggung jawaban, maka setiap kegiatan unit satuan kerja harus dapat diukur keberhasilannya. Tolak ukur kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap satuan unit kerja. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi, maka pada saat penyusunan Rencana Kinerja pada tahun 2019, telah ditetapkan target pencapaian kinerja sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja pada bab sebelumnya. Berikut kami sajikan data pencapaian target kinerja DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi Tahun 2021 :

1. Capaian Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Untuk Capaian Target dan Realisasi Kinerja tahun 2021 dapat dilihat dari table yang sudah kami susun sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi Tahun 2021

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3		
Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi umum bagi unit kerja	Persentase Unit kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi umum	100 %	100%	100%
Meningkatnya ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi	100 %	100%	100%
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Capaian Nilai LAKIP	BB	BB	100%
Tersedianya Pekerja sosial Profesional dan atau TKS dan atau Relawan sosial yang disediakan	Rasio Pekerja sosial Profesional dan atau TKS dan atau Relawan sosial yang disediakan	1: 200	1:200	100%
Terpenuhinya rehabilitasi sosial bagi warga Negara penyandang disabilitas di luar panti	Persentase Warga Negara Penyandang disabilitas yang memperoleh	100 %	100%	100%

	rehabilitasi sosial diluar panti			
Terpenuhinya rehabilitasi sosial bagi anak terlantar di luar panti	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	100%	100%
Terpenuhinya rehabilitasi sosial bagi Lanjut usia terlantar di luar panti	Persentase Lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	100%	100%
Terpenuhinya rehabilitasi sosial bagi Gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase Gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	100%	100%
Terpenuhinya Kebutuhan dasar Korban bencana dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	Persentase Korban bencana dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100 %	100%	100%
Tersedianya data fakir miskin yang digunakan untuk perlindungan dan jaminan sosial	Persentase data fakir miskin yang digunakan untuk perlindungan dan jaminan sosial	100 %	100%	100%
Meningkatnya rasio akseptor KB	Rasio akseptor	78,90%	79,13%	100,29%
Meningkatnya kemandirian akseptor KB	Rasio akseptor KB mandiri	80 %	80%	100%
Terkendalinya jumlah anak dalam setiap keluarga	Rata rata jumlah anak per keluarga	2,3	2,3	100%
Terpenuhinya kebutuhan Ber-KB	Unmeet need	9,1%	9,6	94,79%
Berkurangnya Pasangan Usia subur <	Cakupan PUS (Pasangan Usia Subur)<20 tahun	0,65%	0,37%	175%
Meningkatnya cakupan kepesertaan keluarga dalm BKB	Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKB	12,39%	46,49%	375%
Meningkatnya cakupan kepesertaan keluarga dalm BKR	Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKR	14,46%	26,95%	186%
Meningkatnya cakupan kepesertaan keluarga dalm BKL	Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKL	11,66%	29,72%	254 %

Meningkatnya cakupan kepesertaan keluarga dalam UPPKS	Cakupan kepesertaan keluarga dalam UPPKS	0,37%	2,17%	586%
Meningkatnya cakupan kepesertaan keluarga dalam PIK R/M	Cakupan kepesertaan keluarga dalam PIK R/M	1,25%	8,9%	712%
Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak	Persentase anak yang terlayani kebutuhan dasar	87,94%	89,82%	102%
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Persentase Partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah	33%	59,2%	179%
Terfasilitasinya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan di P2TP2A	100 %	100%	100%
Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender	Persentase data gender dan anak yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	100%	100%	100%
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Persentase keluarga yang mendapat program peningkatan kualitas keluarga	100%	100%	100%

2. Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja 2019,2020 Dan 2021

Sasaran 2.1.

Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi umum bagi unit kerja

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
Persentase Unit kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi umum	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Untuk indikator kinerja pertama yakni persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum indikator ini tercapai realisasi kinerja 100 %. Indikator ini mendukung tersedianya pelayanan umum meliputi pelayanan sarana dan prasarana untuk menunjang keberlangsungan dan kelancaran administrasi di semua unit kerja yang ada di DINSOSP2KBP3A meliputi penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, penyediaan sarana dan prasarana pendukung pemerintahan, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. Indikator ini dapat tercapai 100 % karena merupakan kegiatan rutin untuk memfasilitasi kebutuhan organisasi serta tidak ada kendala yang dihadapi .

Sasaran 2.2.

Meningkatnya ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
Persentase ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator kinerja yang kedua adalah Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi. Indikator ini merupakan indikator yang baru yang menjadi sasarannya adalah meningkatnya ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi

denga harapan untuk lebih meningkatkan profesionalisme pegawai yang ada di DINSOSP2KBP3A. Capaian Kinerja 100% Ketersediaan ASN yang sesuai dengan kompetensi sangatlah terbatas, namun melalui segala bentuk penambahan wawasan melalui bintek ataupun pelatihan diharapkan mampu mengimbangi kesesuaian, karenanya berbagai upaya dilakukan untuk mendukung kompetensi ASN agar sesuai dengan harapan, sedangkan untuk tahun tahun sebelumnya indikatornya berbeda hanya jumlah ASN yang terbina saja.

Sasaran 2.3.
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
Capaian Nilai LAKIP	B	70,95	BB	B	BB	78,89	BB	BB	100%

Indikator kinerja untuk sasaran strategis berikutnya Capaian Nilai LAKIP, bahwa dari tahun ke tahun capaian untuk indikator ini selalu mengalami kenaikan ini menunjukkan bahwa DINSOSP2KBP3A selalu berusaha untuk memenuhi semua target dan sasaran yang telah ditetapkan, memperbaiki segala kekurangan dan melaksanakan apa yang direkomendasikan oleh instansi lain yang mengevaluasi kinerja kita dengan harapan tahun berikutnya bisa mendapatkan nilai sesuai harapan.

Sasaran 2.4.
Tersedianya Pekerja sosial Profesional dan atau TKS dan atau Relawan sosial yang disediakan

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
Rasio Pekerja sosial Profesional dan atau TKS dan atau Relawan sosial yang disediakan	-	-	-	-	-	-	1:200	1:200	100%

Indikator yang keempat adalah Tersedianya Pekerja sosial Profesional dan atau TKS dan atau Relawan sosial yang disediakan, Indikator ini menghitung ketersediaan Tenaga Pekerja Sosial Profesional atau TKS dan atau relawan sosial yang disediakan untuk mendampingi Keluarga Penerima manfaat (KPM),seorang Pekerja Sosial mendampingi 200 Keluarga Penerima Manfaat dan ketercapaian Indikator ini 100% artinya sesuai dengan target yang ditetapkan.

Sasaran 2.5.
Terpenuhinya rehabilitasi sosial bagi warga Negara penyandang disabilitas di luar panti

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
Persentase Warga Negara Penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	-	-	-	225	225	100%	325	325	100 %

Sasaran 2.7.
Terpenuhinya rehabilitasi sosial bagi anak terlantar di luar panti

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	-	-	-	125	125	100%	125	125	100%

Sasaran 2.8.
Terpenuhinya rehabilitasi sosial bagi Lanjut usia terlantar di luar panti

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
Persentase Lanjut usia terlantar yang	-	-	-	200	200	100%	200	200	100%

memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sasaran 2.9.
Terpenuhinya rehabilitasi sosial bagi Gelandangan dan pengemis di luar panti

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
Persentase Gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	-	-	-	25	25	100%	30	30	100%

Sasaran 2.10.
Terpenuhinya Kebutuhan dasar Korban bencana dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
Persentase Korban bencana dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	-	-	-	-	-	-	-	45 KK	100%

Sasaran dan Indikator kinerja selanjutnya adalah Terpenuhinya rehabilitasi sosial bagi warga Negara penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis di luar panti serta Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota bahwa untuk indikator tersebut merupakan bagian dari SPM berdasarkan Permensos

nomor 9 tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Propinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota harus dicapai 100 persen untuk setiap layanan dasar. Adapun Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sosial daerah Kabupaten/kota terdiri atas :

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti
3. Rehabilitasi sosial dasar lansia terlanatar diluar panti
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupate/kota

Perlu kami sampaikan bahwa pemenuhan semua indikator SPM harus dicapai sesuai target yaitu 100 %, dan untuk Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota selama tahun 2021 hanya terjadi dan diberikan kepada 45 KK saja sesuai dengan kejadian bencana. Semua pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban terpenuhi, artiya bahwa DINSOSP2KBP3A senantiasa selalu berupaya untuk siap dan siaga ketika terjadi bencana dan berupaya dengan maksimal untuk melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait penanganan bencana pada saat dan setelah bencana.

Sasaran 2.11.
Tersedianya data fakir miskin yang digunakan untuk perlindungan dan jaminan sosial

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
Persentase data fakir miskin yang digunakan untuk perlindungan dan jaminan sosial	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%

Sasaran dan Indikator kinerja selanjutnya adalah Tersedianya data fakir miskin yang digunakan untuk perlindungan dan jaminan sosial, bahwa indikator ini merupakan pemenuhan data bagi SKPD lain yang memerlukan data DTKS sesuai peruntukannya.

**Sasaran 2.12.
Meningkatnya rasio akseptor KB**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
Rasio akseptor	78,70%	78,89%	100,11%	78,80%	79,89%	101,3%	78,90%	79,13%	100,29%

Indikator kinerja berikutnya yang dievaluasi adalah meningkatnya rasio akseptor KB dari target 78,90% tercapai 79,13% tercapai kinerja sebesar 100,29%. Keberhasilan capaian kinerja ini dikarenakan adanya peningkatan pengguna MKJP serta naiknya kepesertaan ber-KB juga kelestarian ber-KB lebih terjamin, semakin percayanya pasangan usia subur terhadap penggunaan alat kontrasepsi MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) hal ini menunjukkan bahwa kinerja bidang KB, petugas lini lapangan serta sosialisasi, Konseling, Informasi dan Edukasi terhadap pentingnya ber-KB kepada masyarakat luas dan pasangan usia subur dapat berjalan dengan optimal. Dalam masa pandemik metode yang digunakan untuk melakukan pelayanan KB tidak dengan mengumpulkan massa akan tetapi dengan pelayanan langsung ke faskes faskes, dibantu juga oleh kader pos KB dan Sub Pos KB yang langsung menggiring calon peserta KB ke fasilitas kesehatan baik itu Puskesmas serta klinik pemerintah dan swasta. Sinergitas serta koordinasi dengan berbagai instansi dilaksanakan dengan baik, misalnya dengan BKKBN Jawa Barat, Kodim, fasilitas kesehatan serta praktek bidan mandiri.

**Sasaran 2.13.
Meningkatnya kemandirian akseptor KB**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
Rasio akseptor KB mandiri	80%	79,92%	99,9%	80%	80%	100%	80%	80%	100%

Indikator kinerja selanjutnya adalah Rasio akseptor KB mandiri yang berhasil mencapai target kinerja 100 % hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kebutuhan ber-KB karena informasi serta edukasi yang disampaikan oleh petugas lini lapangan serta mudahnya mengakses informasi menjadikan masyarakat lebih mengerti yang pada akhirnya rasio akseptor KB mandiri tercapai targetnya.

Sasaran 2.14.
Terkendallnya jumlah anak dalam setiap keluarga

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
Rata rata jumlah anak per keluarga	-	-	-	-	-	-	2,3	2,3	100%

Indikator kinerja berikutnya yang dievaluasi adalah rata rata jumlah anak per keluarga yang tercapai 100%. Ini menunjukkan bahwa pasangan usia subur yang ada di Kota Cimahi rata rata mempunyai anak antara 2 sampai 3 orang, ini menjadi tantangan bagi bidang KB khususnya supaya bisa menaikkan angka ketercapaian indikator ini agar setiap keluarga hanya maksimal mempunyai dua orang anak.

Sasaran 2.15.
Terpenuhinya kebutuhan Ber-KB

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
Unmeet need	-	-	-	-	-	-	9,1	9,6	94,79%

Indikator Unmeet need secara angka terlihat melebihi target , angka capaian ini seharusnya menurun dari target yang ditetapkan, jadi untuk capaian kinerja perhitungannya dibalik target dibagi realisasi dikali 100%, sehingga capaian kinerja yang diperoleh hanya 94,79%. Kondisi saat ini ketidaktercapaian dipengaruhi banyak faktor, salah satunya adalah karena pandemic , karena PPKM yang membatasi orang untuk mendatangi fasilitas kesehatan dan karena kehati-hatian calon akseptor yang takut terpapar covid 19.

Capaian ini berarti bukan berarti pelayanan KB tidak maksimal hanya saja perlu diketahui bahwa penduduk Kota Cimahi mobilitasnya sangat tinggi laju yang datang dan yang keluar dari Kota Cimahi sangatlah tinggi terlebih di daerah daerah industri.

Sasaran 2.16.
Berkurangnya Pasangan Usia subur < 20

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
Cakupan PUS (Pasangan Usia Subur <20 tahun	-	-	-	-	-	-	0,65%	0,37	175%

Indikator kinerja berikutnya yang dievaluasi adalah Cakupan Pasanga Usia subur < 20 Tahun dengan realisasi sebesar 176% ini menunjukkan bahwa Bidang KB DINSOSP2KBP3A berhasil menstabilkan angka kawin pertama menaikkan rata rata usia kawin pertama.

Sasaran 2.17.
Meningkatnya cakupan kepesertaan keluarga dalm BKB

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKB	-	-	-	-	-	-	12,39%	46,49%	375%

Indikator kinerja cakupan kepesertaan keluarga dalam BKB merupakan indikator baru yang harus dievaluasi dan hasil kinerja diperoleh sebesar 46,49% dari target 12,39% dengan capaian kinerja sebesar 375% angka ini diperoleh dari hasil pendataan keluarga yang dilaksanakan di tahun 2021. Ini membuktikan bahwa kepesertaan keluarga mengikuti Bina Keluarga Balita naik signifikan fenomena ini didukung juga oleh senangnya masyarakat terutama ibu ibu untuk berkumpul dan bersosialisasi , pengetahuan ibu ibu muda sangat meningkat tetang tata cara pola asuh anak, keingintahuan mereka didukung juga dengan kemudahan mengakses berbagai informasi dari medsos terkait dengan pola asuh anak sehingga ketercapaian BKB sangat tinggi.

Sasaran 2.18.
Meningkatnya cakupan kepesertaan keluarga dalam BKR

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKR	-	-	-	-	-	-	14,46%	26,95%	186%

Indikator kinerja Cakupan Kepesertaan keluarga dalam BKR atau Bina Keluarga Remaja dengan target sebesar 14,46 % tercapai sebesar 26,95% jadi capaian kinerja sebesar 186% capaian ini menunjukkan berhasilnya KIE (Konseling, Informasi dan Edukasi) yang dilakukan oleh DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi.

Sasaran 2.19.
Meningkatnya cakupan kepesertaan keluarga dalam BKL

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKL	-	-	-	-	-	-	11,66%	29,72%	254%

Indikator kinerja Cakupan Kepesertaan keluarga dalam BKL atau Bina Keluarga Lansia dengan target sebesar 11,66 % tercapai sebesar 29,72% capaian kinerja sebesar 254% capaian ini menunjukkan berhasilnya KIE (Konseling, Informasi dan Edukasi) dengan sasaran usia lanjut usia yang dilakukan oleh DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi.

Sasaran 2.20.
Meningkatnya cakupan kepesertaan keluarga dalam UPPKS

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
Cakupan kepesertaan keluarga dalam UPPKS	-	-	-	-	-	-	0,37%	2,17%	586%

Indikator kinerja Cakupan Kepesertaan keluarga dalam UPPKS sangatlah tinggi dari target 0,37% tercapai 2,17% sehingga capaian kinerja mencapai 586%,

ketercapain Indikator ini didukung oleh banyak faktor terlebih dimasa pandemic setiap keluarga akan berusaha untuk bertahan hidup dan menaikan pendapatan keluarga dengan berbagai cara tanpa harus keluar rumah (juala on line) peran media sosial dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan keluarga, serta optimalnya pelaksanaan KIE kepada masyarakat.

Sasaran 2.21.
Meningkatnya cakupan kepesertaan keluarga dalm PIK R/M

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
Cakupan kepesertaan keluarga dalam PIK R/M	-	-	-	-	-	-	1,25%	8,9%	712%

Indikator kinerja Cakupan Kepesertaan keluarga dalam PIK R/M (Pusat Informasi Keluarga Remaja dan Mahasiswa) tercapai sagat bagus , dari target 1,25 bisa tercapai sebesar 8,9% jadi capaian kinerja sebesar 712% , sama halnya dengan tribina (BKR, BKB, dan BKL) kepesertaan keluarga dalam PIK dipengaruhi oleh berbagai hal, namun ini lebih menunjukan kerja keras dari petugas lini lapangan dalam menyebarkan informasi , sosialisasi dan edukasi kesemua sasaran berhasil dengan baik serta banyaknya waktu luang yang dimiliki oleh para remaja dan mahasiswa akibat penerapan Pembelajaran Jarak Jauh mendorong sebagian remaja mencari aktivitas lain seperti PIK R/M.

Sasaran 2.22.
Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
Persentase anak yang terlayani kebutuhan dasar	62,50%	87,94%	140,70%	65%	50%	76,92%	87,94%	89,82%	102%

Indikator Persentase anak yang terlayani kebutuhan dasar mempunyai target 87,94% , indikator ini hanya dihitung dari ketiga kebutuhan dasar anak yang harus dilayani yaitu kebutuhan pendidikan dasar (SD, SMP dan SMA) dengan hasil ketercapaian sebesar 95,9, kebutuhan akan pelayanan imunisasi dasar

dicapai sebesar 91,89% dan kebutuhan ketersediaan akta kelahiran dicapai dengan sebesar 86,79 sehingga ketercapaian kinerja Indikator ini mencapai 89,82%. Dari ketiga pemenuhan kebutuhan dasar anak tersebut maka capaian kinerja mencapai 102 %, Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Cimahi senantiasa hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Sasaran 2.23.
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
Persentase Partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah	-	-	-	-	-	-	33%	59,2%	179%

Indikator Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah ditargetkan sebesar 33% pada tahun 2021 tercapai sebesar 59,2% dengan capaian kinerja sebesar 179% hasil ini diperoleh dengan cara menghitung jumlah ASN perempuan dibagi jumlah keseluruhan jumlah ASN yang ada di Pemkot Cimahi. Ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan khususnya di Pemkot Cimahi cukup tinggi, perempuan bisa meyakinkan semua pihak bahwa dia mampu untuk mengambil peran pada pemerintahan.

Sasaran 2.23.
Terfasilitasinya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan di P2TP2A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan di P2TP2A ditargetkan 100% dan tercapai 100% artinya semua pengaduan yang diterima oleh P2TP2A Kota Cimahi selalu diselesaikan dan tertangani seluruhnya. Penanganan dan pelayanan yang diberikan tidak saja

pada pendampingan psycologis, pendampingan psyco sosial akan tetapi sampai pada tahapan pendampingan hukum da medis juga. Selama tahun 2021 terdapat 27 pengaduan kasus kekerasan meliputi 13 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 14 kasus kekerasan terhadap anak. Ke-27 kasus tersebut telah mendapatkan penanganan di P2TP2A sehingga capaian kinerjanya mencapai 100 %. Hal ini membuktikan adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dalam penanganan kasus antara P2TP2A dan Bidang yang menangani permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik koordinasi Internal dan eksternal.

Sasaran 2.24.
Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
Persentase data gender dan anak yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%

Indikator selanjutnya yang dievaluasi adalah persentase data gender dan anak yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan, realisasi kinerja indikator ini tercapai 100% dari target 100% dengan asumsi bahwa data gender dan anak dipakai dalam menentukan perencanaan pembangunan.

Sasaran 2.24.
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
Persentase keluarga yang mendapat program peningkatan kualitas keluarga	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%

Indikator selanjutnya yang dievaluasi adalah persentase keluarga yang mendapat program peningkatan kualitas keluarga, realisasi kinerja indikator ini tercapai 100% dari target 100%. Sasaran dari indikator ini adalah 100 KK binaan yang ada di lokasi P2WKSS .

3. Realisasi Tahun 2021 Dengan Target RPJMD Perubahan

Indikator	Target RPJMD 2018-2022	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2019
Persentase Unit kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi umum	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi	100 %	100 %	100%	100%
Capaian Nilai LAKIP	BB	BB	BB	100%
Rasio Pekerja sosial Profesional dan atau TKS dan atau Relawan sosial yang disediakan	1:200	1:200	1:200	100%
Persentase Warga Negara Penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%
Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%
Persentase Lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%
Persentase Gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%
Persentase Korban bencana dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100%	100%	100%	100%

Persentase data fakir miskin yang digunakan untuk perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%	100%
Rasio akseptor	78,90%	78,90%	79,13 %	100,29%
Rasio akseptor KB mandiri	80%	80%	80%	100%
Rata rata jumlah anak per keluarga	2,3	2,3	2,3	100%
Unmeet need	9,1%	9,1%	9,6%	94%
Cakupan PUS (Pasangan Usia Subur)<20 tahun	0,65%	0,65%	0,37%	175%
Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKB	12,39%	12,39%	46,49%	375 %
Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKR	14,46%	14,46%	26,95%	186%
Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKL	11,66%	11,66%	29,72%	254%
Cakupan kepesertaan keluarga dalam UPPKS	0,37%	0,37%	49,49%	586%
Cakupan kepesertaan keluarga dalam PIK R/M	1,25%	1,25%	8,9%	712%
Persentase anak yang terlayani kebutuhan dasar	87,94%	87,94%	89,82%	102%
Persentase Partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah	33%	33%	59,2%	179%
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan di P2TP2A	100%	100%	100%	100%
Persentase data gender dan anak yang	100%	100%	100%	100%

dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan				
Persentase keluarga yang mendapat program peningkatan kualitas keluarga	100%	100%	100%	100%

4. Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan SPM

Indikator	Target SPM	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2021
Persentase Unit kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi umum	-	100 %	100 %	100 %
Persentase ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi	-	100 %	100%	100 %
Capaian Nilai LAKIP	-	BB	BB	100%
Rasio Pekerja sosial Profesional dan atau TKS dan atau Relawan sosial yang disediakan	-	1:200	1:200	100%
Persentase Warga Negara Penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%
Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%
Persentase Lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%
Persentase Gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%
Persentase Korban bencana dan sosial	100%	100%	100%	100%

yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota				
Persentase data fakir miskin yang digunakan untuk perlindungan dan jaminan sosial	-	100%	100%	100%
Rasio akseptor	-	78,90%	79,13 %	100,29%
Rasio akseptor KB mandiri	-	80%	80%	100%
Rata rata jumlah anak per keluarga	-	2,3	2,3	100%
Unmeet need	-	9,1%	9,6%	94%
Cakupan PUS (Pasangan Usia Subur)<20 tahun	-	0,65%	0,37%	175%
Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKB	-	12,39%	46,49%	375 %
Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKR	-	14,46%	26,95%	186%
Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKL	-	11,66%	29,72%	254%
Cakupan kepesertaan keluarga dalam UPPKS	-	0,37%	49,49%	586%
Cakupan kepesertaan keluarga dalam PIK R/M	-	1,25%	8,9%	712%
Persentase anak yang terlayani kebutuhan dasar	-	87,94%	89,82%	102%
Persentase Partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah	-	33%	59,2%	179%
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan di P2TP2A	-	100%	100%	100%
Persentase data gender dan anak yang dimanfaatkan dalam perencanaan	-	100%	100%	100%

pembangunan				
Persentase keluarga yang mendapat program peningkatan kualitas keluarga	*	100%	100%	100%

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Keberhasilan program dan kegiatan dalam rangka mencapai Indikator kinerja utama akan sangat dipengaruhi oleh daya dukung sumber daya yang dimiliki oleh sebuah organisasi, baik itu sumber daya manusia, sumber dan anggaran, sumber daya sarana dan prasarana, sumber daya kemitraan.

Sumber Daya yang dimiliki oleh DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi tahun 2021 meliputi :

- Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang mendukung keberlangsungan dan pelaksanaan Program dan Kegiatan saat ini terdiri dari :

A S N : 42 Orang

THL APBD : 42 Orang

THL Propinsi : 16 Orang

THL Pusat/PKH : 52 Orang

- Sumber Daya Anggaran dan pembiayaan

Sumber dana yang dimiliki selain dari APBD juga dana yang diperoleh dari DAK, Bantuan Gubernur (Tentatif) juga dana dari BAZNAS Kota Cimahi ataupun sumbangan perorangan (untuk kegiatan sosial)

- Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana yang dimiliki meliputi : Gedung dan Kendaraan Operasional

Gedung terdiri dari 9 Bangunan terdiri dari :

a. Gedung kantor DINSOSP2TP2A

b. Gedung Balai Penyuluh KB

c. Gudang Alat Kontrasepsi

d. Gedung Sekretariat P2TP2A

e. Rumah Singgah

f. Gudang Arsip

g. Sekretariat PKH

h. Sekretariat Bersama LK3

i. Sekretariat Tagana

Untuk beberapa sarana yang dimiliki seperti Gedung Sekretariat P2TP2A, Rumah Singgah, Gudang Arsip, Sekretariat PKH, Sekretariat Bersama LK3 dan Sekretariat Tagana statusnya masih sewa kepada pihak lain ini menunjukkan bahwa DINSOSP2KBP3A akan senantiasa berupaya maksimal menggunakan sumber daya yang ada untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

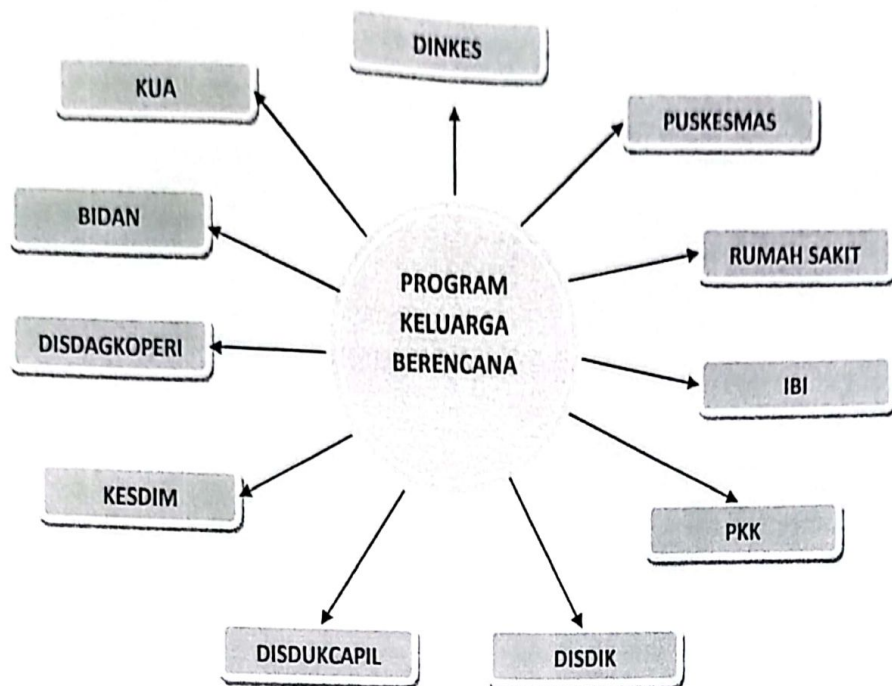
- **Sarana transportasi (Kendaraan Operasional)**

Sarana kendaraan operasional yang dimiliki oleh DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi :

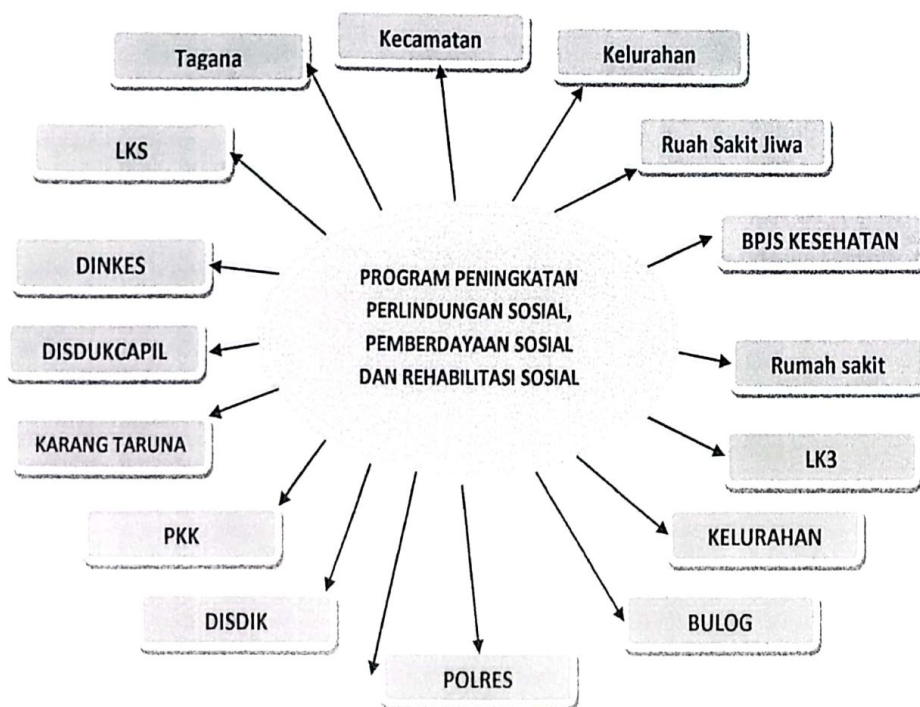
- Kendaraan Akseptor KB satu unit
- Kendaraan Mobil Perlindungan (MOLIN) satu unit
- Kendaraan /Mobil Penerangan (Mupen KB) satu unit
- Kendaraan Mobil BOX Untuk Distribusi Alkon satu unit
- Kendaraan Roda dua sebanyak 9 Unit

6. Cross Cutting Program Dengan SKPD Terkalt Dan Instansi Lainnya

1) CROSS CUTTING PROGRAM KELUARGA BERENCANA



1) CROSS CUTTING PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN REHABILITASI SOSIAL



2) CROSS CUTTING PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN



3) CROSS CUTTING PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK



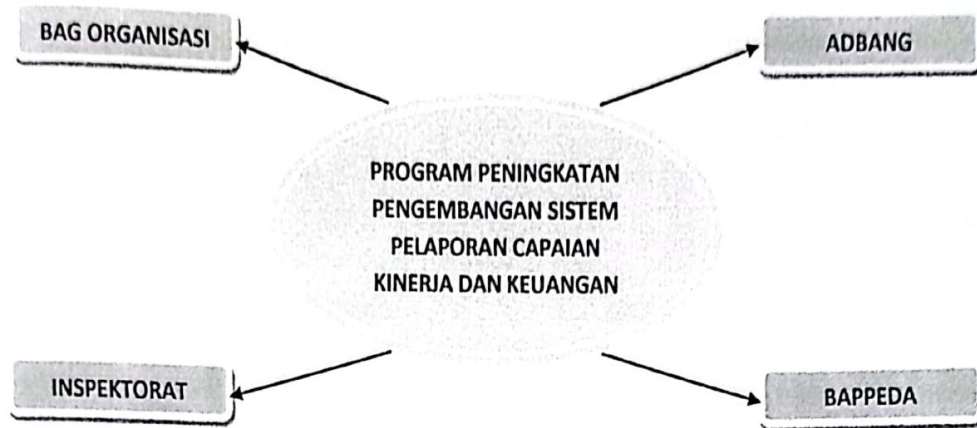
4) CROSS CUTTING PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR



5) CROSS CUTTING PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR



**6) CROSS CUTTING PENINGKATAN PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**



7. Prestasi, Penghargaan dan Inovasi DINSOSP2KBP3A Tahun 2021

- Juara III Keluarga Teladan Tingkat Provinsi Jawa Barat;
- Juara III Pelaksana Terbaik Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS) Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2021;
- Juara Harapan I pelaksana terbaik perilaku bersih dan sehat (PHBS) tahun 2021 Tingkat Provinsi Jawa Barat;
- Juara Harapan II Pelaksana terbaik Kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2021;
- Juara II Pelaksana terbaik IVA Test lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2021;
- Juara I Pelaksana terbaik Pola asuh Anak dan Remaja (PAAR) Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2021;
- Juara I Pelaksana Pendataan Keluarga Tahun 2021 Tingkat Provinsi Jawa Barat;

8. Prestasi, Penghargaan dan Inovasi DINSOSP2KBP3A Tahun 2020

- Juara I Duta Genre Puteri Tk. Provinsi Jawa Barat
- Juara II Duta Genre Puteri Tk. Nasional
- Juara I pelaksana IVA Test Lomba 10 Program Pokok PKK Tk. Provinsi Jawa Barat (Kel. Cigugur Tengah)
- Juara I terbaik Pola asuh Anak dan Remaja (PAAR) Tk. Provinsi Jawa Barat (Kel. Cigugur Tengah)
- Juara III Pelaksana terbaik UP2K Lomba 10 Program PKK Tk. Provinsi Jawa Barat. (kel. Cigugur Tengah)
- Terbaik ke III Kelompok BKR Tk. Provinsi Jawa Barat (Kel. Cibabat)
- Juara Video Terkreatif Tk. Provinsi Jawa Barat untuk PIK Remaja (Kel. Citeureup)
- Harapan III Pelaksana terbaik Tertib administrasi Lomba 10 Program PKK Tk. Provinsi Jawa Barat. (Kel. Cigugur Tengah)
- Juara ke II Apresiasi kampung KB Tingkat Provinsi.
- Inovasi yang digunakan pada saat pandemic Covid adalah SIDADU merupakan Sistem data terpadu yang dipakai untuk meminimalisir kesalahan data KPM yang akan menerima bansos sehingga bansos akan tepat sasaran. Juga adanya Kolaborasi dalam hal pendistribusian bansos dengan melibatkan beberapa unsure di masyarakat misalnya PKK, Karang taruaa, LPM, RT, RW juga dengan adanya keterlibatan semua SOPD yang mempunyai wilayah binaan masing masing.

BAB IV PENUTUP

4.1 Penutup

Pada bagian penutup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi Tahun 2021 Ini, dapat Kami simpulkan bahwa DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi secara umum mempunyai 4 (empat) Tujuan, 4 Sasaran Strategis, 5 Indikator Kinerja Utama dan 25 (dua puluh lima) Indikator kinerja program.

Penyusunan laporan Ini dimaksudkan untuk mengukur capaian kinerja indikator sasaran dan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berkaitan dengan hal itu, maka berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 25 indikator program, dapat diinformasikan ketercapaian kinerja indikator sasaran sebagai berikut : 13 indikator kinerja program berhasil mencapai target kinerja 100 %, 9 indikator kinerja program berhasil melampaui target yang ditetapkan yakni indikator Rasio akseptor (116%), Cakupan PUS (Pasangan Usia Subur <20) tahun (175%) , Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKB (375%) , Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKR (186%) ,Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKL (254%), Cakupan kepesertaan keluarga dalam UPPKS (586%), Cakupan kepesertaan keluarga dalam PIK R/M (712%) , Persentase Partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah (179%), Persentase anak yang terlayani kebutuhan dasarnya sebesar (102%) . Terdapat 1 (satu) indikator yang tidak tercapai yaitu unmeet eed (94,79%). Dari capaian semua indikator maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja DINSOSP2KBP3A secara keseluruhan sudah mencapai target yang telah ditetapkan, pemahaman akan tugas pokok dan fungsi pada masing masing bidang sudah semakin membaik disertai dengan adanya beberapa perubahan target yang diselaraskan dengan Perubahan RPJMD dan Perubahan Rencana Strategis DINSOSP2KBP3A, hal tersebut menjadi keharusan sebagai salah satu upaya agar capaian kinerja menjadi lebih baik sesuai dengan kemampuan pendanaan, sumber daya yang dimiliki serta sarana dan prasarana yang ada.

Permasalahan yang dihadapi oleh DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi cukup banyak, selain keterbatasan anggaran dan dana juga keterbatasan Sumber Daya. Secara Organisasi urusan sosial yang menjadi urusan wajib pemerintahan masih dikelola oleh satu bidang yaitu bidang sosial, sedangkan idealnya urusan sosial semestinya harus dikelola oleh dalam satu organisasi perangkat daerah yang mandiri atau menjadi dinas (Dinas Sosial) sehingga secara organisasi akan maksimal dalam penganggaran dengan dukungan sumber daya yang maksimal pula. Semoga ke

penganggaran dengan dukungan sumber daya yang maksimal pula. Semoga ke depan akan menjadi lebih baik dalam rangka memberikan kesejahteraan dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.